

ABSTRAK

Tindak pidana kecelakaan kerja yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah semakin bertambah, namun tidak dibarengi dengan tahap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun juga melalui pendekatan keadilan restoratif yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional. Oleh karena itu, penulisan hukum ini bertujuan ingin mengetahui: (1) Apakah proses penyidikan tindak pidana kecelakaan kerja oleh penyidik PPNS Ketenagakerjaan sudah berbasis keadilan restoratif? dan (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik PPNS bidang ketenagakerjaan dalam mewujudkan penyidikan tindak pidana kecelakaan kerja yang berbasis keadilan restoratif?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan belum lah berbasis pada keadilan restoratif. PPNS Ketenagakerjaan dalam melakukan proses penyidikan kasus-kasus kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan. Korban dan/atau ahli waris korban tidak dilibatkan dalam proses penyidikan sebagai upaya pemulihan hubungan antara korban dan perusahaan (pelaku). PPNS Ketenagakerjaan belum memiliki inisiatif untuk melibatkan korban dan/atau ahli waris korban. Belum dilakukannya penyidikan yang berbasis keadilan restoratif oleh PPNS Ketenagakerjaan karena adanya kendala dalam struktur hukum yaitu pola pikir dari PPNS Ketenagakerjaan yang berpusat pada peraturan perundang-undangan saja, dimana peraturan internal bidang ketenagakerjaan tidak mengamanatkan hal tersebut dan tidak ada keberanian dari PPNS Ketenagakerjaan untuk melakukan tindakan lebih progresif dalam melakukan penegakan hukum; substansi hukum yaitu belum adanya peraturan internal di bidang ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan kepada PPNS Ketenagakerjaan dapat melakukan *restorative justice* yang membuat PPNS Ketenagakerjaan tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut; dan budaya hukum yaitu tidak profesionalnya sikap Pengawas Ketenagakerjaan dalam penetapan tindak pidana kecelakaan kerja untuk diteruskan atau tidak diteruskan kepada PPNS Ketenagakerjaan.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka perlu diberikan pendidikan hukum, pelatihan-pelatihan dan sosialisasi secara masif kepada Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Ketenagakerjaan sehingga dapat lebih berani melakukan tindakan yang progresif dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana kecelakaan kerja, mengingat kepentingan dan hak-hak pekerja korban kecelakaan kerja haruslah dilindungi oleh negara.

Kata Kunci: Penyidikan; Kecelakaan Kerja; PPNS Ketenagakerjaan; Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

The crime of work accidents that occur in Central Java Province is increasing, but it is not accompanied by the stage of investigation carried out by the labor civil servant investigator. One of the efforts in resolving criminal acts that occur in people's lives is not only through law enforcement efforts, but also a restorative justice approach that is different from the conventional criminal justice system. Therefore, this study aims to find out: (1) Is the process of investigating criminal acts of work accidents by the labor civil servant investigators based on restorative justice? and (2) What are the obstacles faced by the labor civil servant investigators in the employment field in realizing work accident investigations based on restorative justice?

This research is a qualitative research with a sociological juridical approach. The type of data used in this study is primary data that obtained directly by researchers from the source, and secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials, where data is obtained through interviews and literature studies, which are then analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, it was found that the investigation has not yet been based on restorative justice. The labor civil servant investigators in carrying out the process of investigating work accident cases based on the provisions in the Criminal Procedure Code and the Decree of the Director General of Labor Supervision Development Number 134 of 2017 concerning Guidelines for the Handling of Minor Labor Crimes. The victim and/or the victim's heirs are not involved in the investigation process as an effort to restore relations between the victim and the company (perpetrator). The labor civil servant investigators does not yet have the initiative to involve victims and/or victims' heirs. The labor civil servant investigators has not carried out a restorative justice-based investigation due to obstacles in the legal structure, namely the mindset of the labor civil servant investigators which is centered on laws and regulations, where the internal regulations in the labor sector do not mandate this and there is no courage from the labor civil servant investigators to take action more progressive in law enforcement; legal substance, namely the absence of internal regulations in the employment field that give authority to the labor civil servant investigators to carry out restorative justice which makes the labor civil servant investigators not have the courage to do so; and legal culture, namely the unprofessional attitude of the labor inspector in determining work accident crimes to be forwarded or not forwarded to the labor civil servant investigators.

Based on the above, it is necessary to provide legal education, training and massive socialization to labor inspectors and labor civil servant investigators so that they can be more courageous in taking progressive actions in the process of investigating work accidents, considering the interests and rights of workers victims of work accidents must be protected by the state.

Key words: *Investigation; Work Accident; The Labor Civil Servant Investigators; Restorative Justice*